

OPTIMALISASI PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL PKH OLEH DINAS SOSIAL KOTA MEDAN MELALUI GRADUASI DAN PENATAAN PEMUTAKHIRAN DATA**Berlianti¹, Lola Nursafitri², Alexander Hesekei Nadeak³, Hasbul Wafi³**

Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Email : berlianti@usu.ac.id, lolanursafitri8@gmail.com, nadeakalexander@gmail.com,
hasbulwafi52@gmail.com**ABSTRAK**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan sosial bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, tantangan, dan upaya optimalisasi pelaksanaan PKH di Kota Medan. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi terhadap mekanisme program berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PKH di Kota Medan mencakup 10 tahapan utama, mulai dari perencanaan hingga graduasi. Pada tahap implementasi, terdapat kendala signifikan dalam validasi data penerima manfaat, seperti ketidaksesuaian data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi faktual di lapangan. Hambatan teknis, seperti gangguan aplikasi e-PKH dan keterbatasan kapasitas pendamping sosial, juga memengaruhi efektivitas program. Selain itu, resistensi terhadap mekanisme graduasi sering kali menghambat upaya untuk mengalihkan bantuan kepada keluarga miskin yang lebih membutuhkan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, rekomendasi yang diusulkan meliputi penguatan sistem pemutakhiran data berbasis teknologi, peningkatan kapasitas pendamping sosial melalui pelatihan intensif, sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya graduasi, serta pelibatan aktif komunitas dan pihak swasta dalam mendukung pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) graduasi. Kesimpulannya, meskipun pelaksanaan PKH di Kota Medan telah memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan, upaya optimalisasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan program ini berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memperbaiki tata kelola program, PKH dapat menjadi instrumen perlindungan sosial yang mampu memutus mata rantai kemiskinan secara sistematis.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, validasi data, graduasi, bantuan sosial.

ABSTRACT

Family Hope Program (PKH) is one of the Indonesian government's strategic initiatives to alleviate poverty and improve people's welfare through the provision of conditional social assistance. This study aims to analyze the implementation, challenges, and efforts to optimize the implementation of PKH in Medan City. With a qualitative approach, data were obtained through document studies, interviews, and observations of the program mechanism based on the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018. The results of the study show that

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No

234ejf.677.

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Krepa**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

the PKH mechanism in Medan City includes 10 main stages, from planning to graduation. At the implementation stage, there were significant obstacles in validating beneficiary data, such as the inconsistency of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) with factual conditions in the field. Technical obstacles, such as disruptions to the e-PKH application and limited capacity of social assistants, also affected the effectiveness of the program. In addition, resistance to the graduation mechanism often hampers efforts to divert assistance to poor families who are more in need. To overcome these challenges, the proposed recommendations include strengthening the technology-based data update system, increasing the capacity of social assistants through intensive training, more intensive socialization regarding the importance of graduation, and active involvement of communities and the private sector in supporting the empowerment of graduated Beneficiary Families (KPM). In conclusion, although the implementation of PKH in Medan City has had a positive impact on reducing poverty, ongoing optimization efforts are needed to ensure that this program runs more effectively and sustainably. By improving program governance, PKH can become a social protection instrument that is able to break the chain of poverty systematically.

Keywords: Family Hope Program, data validation, graduation, social assistance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, program ini menawarkan bantuan dalam bentuk dana tunai yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan dasar keluarga. Hingga tahun 2023, jumlah penerima manfaat PKH telah mencapai sekitar 10 juta keluarga. Meskipun jumlah ini cukup signifikan, masih tergolong kecil dibandingkan total populasi miskin di Indonesia, yang menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga prasejahtera, dengan harapan bahwa bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Namun efektivitas program ini sangat bergantung pada pemutakhiran data yang akurat dan tepat waktu serta mekanisme graduasi yang efektif. Pemutakhiran data merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa informasi mengenai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH selalu up – to – date. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang perubahan status sosial ekonomi keluarga, termasuk kematian anggota keluarga, kelahiran, perubahan pendidikan anak, dan faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi kelayakan mereka untuk menerima bantuan. Dengan pemutakhiran data yang tepat, Dinas Sosial dapat memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mencegah penyalahgunaan program.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan berfokus pada pemutakhiran data penerima Bansos DTKS, graduasi, dan usulan baru untuk PKH dan BPNT. Kegiatan ini diadakan serentak di 21 kelurahan yang dipilih sebagai percontohan. Setelah tahap sosialisasi awal, langkah selanjutnya adalah tahap pra muskel, di mana data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara rinci. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala lingkungan (kepling), pendamping PKH, perangkat kelurahan, kecamatan, dan Dinas Sosial untuk

memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan representatif. Namun kegiatan pemutakhiran data ini harus terus menerus dilakukan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Medan itu sendiri guna tercapainya target pemuktahiran data yang sempurna.

Salah satu cara pemuktahiran data ialah dengan Graduasi. Graduasi adalah proses di mana KPM PKH dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan, baik karena perbaikan kondisi sosial ekonomi (graduasi sejahtera mandiri) atau karena tidak terpenuhinya kriteria kelayakan (graduasi alami). Proses graduasi harus dilakukan secara sistematis melalui kegiatan resertifikasi yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun. Graduasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali status sosial ekonomi keluarga penerima manfaat dan memastikan bahwa mereka yang telah berhasil keluar dari kemiskinan tidak kehilangan akses ke program pemberdayaan lainnya. Tahapan graduasi ini direncanakan berlangsung dalam jangka waktu dua minggu. Selama tahap ini, setiap data yang diambil dari lapangan akan dibedah satu per satu untuk menghasilkan data graduasi dan usulan baru yang lebih valid. Pemerintah Kota Medan berharap bahwa dengan adanya tahap ini, data penerima Bansos – baik yang telah graduasi maupun yang diusulkan baru – akan lebih dapat di pertanggungjawabkan, karena sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, mereka menekankan pentingnya pendataan yang dilakukan secara serius, merata, dan tanpa pilih kasih, agar hanya keluarga yang benar – benar kurang mampu yang menjadi prioritas utama yang diusulkan.

Saat ini Kota Medan sangat membutuhkan urgensi optimalisasi. Optimalisasi penerimaan bantuan sosial melalui pemutakhiran data dan graduasi sangat penting untuk mencapai tujuan PKH. Dengan adanya sistem yang baik dalam pemutakhiran data dan mekanisme graduasi yang jelas, Dinas Sosial Kota Medan dapat meningkatkan efektivitas dalam mendistribusikan bantuan sosial yang ada saat ini kepada masyarakat. Ini tidak hanya akan membantu mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan tetapi juga memastikan bahwa keluarga – keluarga yang telah berhasil keluar dari kondisi prasejahtera dapat beralih ke program – program lain yang mendukung keberlanjutan kesejahteraan mereka. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Medan menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar – benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dengan pemutakhiran dan validasi data yang lebih baik lagi, diharapkan PKH dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat miskin di Kota Medan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan secara mendalam. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan fenomena sosial yang kompleks, termasuk mekanisme implementasi, kendala, dan upaya optimalisasi program. Penelitian ini berfokus pada analisis proses dan konteks pelaksanaan PKH berdasarkan data empiris yang diperoleh dari berbagai sumber.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan, dengan fokus pada pelaksanaan PKH di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Subjek penelitian meliputi:

- a. Pihak Pelaksana PKH: Koordinator PKH, pendamping sosial, dan petugas Dinas Sosial Kota Medan.
- b. Keluarga Penerima Manfaat (KPM): Individu atau keluarga yang menerima bantuan sosial melalui PKH.
- c. Pihak Terkait Lainnya: Kepala lingkungan (kepling), perangkat kelurahan, dan masyarakat yang terlibat dalam mekanisme program.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data:

1. Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan koordinator PKH, pendamping sosial, dan KPM, serta observasi langsung pada proses implementasi PKH di lapangan.

2. Data Sekunder: Meliputi dokumen resmi seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, laporan pelaksanaan PKH, data DTKS, serta artikel dan penelitian sebelumnya yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali informasi dari koordinator PKH, pendamping sosial, dan KPM terkait pelaksanaan, kendala, dan persepsi terhadap program. Panduan wawancara disusun berdasarkan indikator pelaksanaan PKH.
- b. Observasi
Observasi langsung dilakukan pada kegiatan pendampingan, pertemuan peningkatan kapasitas keluarga (P2K2), proses validasi data, dan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Teknik ini bertujuan untuk memahami secara langsung pelaksanaan program di lapangan.
- c. Dokumentasi
Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen resmi seperti laporan tahunan PKH, data KPM, dan rekaman administrasi yang digunakan dalam proses validasi, penyaluran bantuan, dan graduasi.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis kualitatif interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi:

- a. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data: Menyaring data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian untuk mengidentifikasi pola dan tema.
- c. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang temuan.
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Menyimpulkan hasil analisis dan memverifikasinya melalui triangulasi data untuk memastikan validitas dan keakuratan temuan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. PKH dirancang untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga prasejahtera, dengan harapan agar bantuan tersebut dapat meringankan beban pengeluaran keluarga sekaligus meningkatkan akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Program ini telah berjalan sejak tahun 2008 dan terus mengalami peningkatan baik dalam jumlah penerima manfaat maupun alokasi dana yang diberikan. Hingga tahun 2024, implementasi PKH di Kota Medan mencatat perkembangan yang cukup signifikan, di mana pada Tahap I (Januari-Februari 2024) terdapat 50.222 KPM dengan total bantuan sebesar Rp35.480.157.391,- dan Tahap II (Maret-April 2024) sebanyak 47.932 KPM dengan bantuan sebesar Rp33.914.882.423,-, sehingga total anggaran bantuan mencapai Rp69.395.039.814,- dalam dua tahap awal tahun tersebut.

Namun, di balik capaian ini, terdapat sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian data antara calon penerima manfaat yang diajukan oleh pemerintah daerah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data yang disetujui oleh Kementerian Sosial. Hal ini sering kali menyebabkan adanya keluarga miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi tidak masuk dalam daftar penerima manfaat. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem validasi data, di mana proses verifikasi dan pencocokan data yang dilakukan oleh pendamping sosial membutuhkan waktu lebih panjang untuk memastikan akurasi.

Selain itu, sistem penyaluran bantuan sosial yang telah menggunakan metode non-tunai melalui perbankan juga menghadapi kendala teknis. Beberapa permasalahan yang kerap muncul di lapangan meliputi saldo nol pada kartu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima manfaat,

kartu yang tertelan mesin ATM, hingga kesalahan nama dalam buku tabungan. Kondisi ini tidak hanya memperlambat distribusi bantuan, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas program. Pendamping sosial sering kali menjadi ujung tombak untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, meskipun terkadang mereka kekurangan sumber daya dan waktu untuk menangani jumlah kasus yang besar.

Dalam proses penyaluran, pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Salah satunya adalah dengan melibatkan Family Development Session (FDS) sebagai bagian dari pemberdayaan dan edukasi bagi penerima manfaat. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemanfaatan bantuan secara optimal, tetapi juga mendukung perubahan pola pikir dan perilaku keluarga penerima manfaat agar lebih mandiri dalam jangka panjang.

Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas KPM

Pendampingan merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), terutama dalam memastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mengakses layanan dasar secara optimal sekaligus memanfaatkan bantuan sosial dengan cara yang tepat. Di Kota Medan, peran pendamping sosial sangat penting dalam mendampingi lebih dari 50.000 KPM setiap tahunnya, termasuk dalam kegiatan edukasi melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal sebagai Family Development Session (FDS).

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada KPM tentang berbagai aspek penting, seperti pengelolaan keuangan keluarga, pentingnya pendidikan bagi anak-anak, akses terhadap layanan kesehatan, hingga strategi pemberdayaan ekonomi. P2K2 dirancang untuk menjadi forum interaktif di mana pendamping sosial dapat berkomunikasi langsung dengan KPM, memberikan arahan, dan memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam jangka pendek, pendampingan ini membantu keluarga penerima manfaat untuk lebih bijak dalam menggunakan dana bantuan. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan melalui perubahan perilaku yang positif.

Namun, pelaksanaan pendampingan di Kota Medan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah jumlah pendamping sosial yang terbatas dibandingkan dengan jumlah KPM yang harus mereka dampingi. Hal ini mengakibatkan kurangnya intensitas dan kedalaman interaksi antara pendamping sosial dan KPM. Selain itu, sebagian pendamping sosial juga merasa kurang mendapatkan pelatihan atau pembekalan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi sebagian KPM dalam kegiatan FDS. Beberapa keluarga penerima manfaat cenderung menganggap kegiatan ini sebagai formalitas belaka dan kurang memahami pentingnya edukasi yang diberikan. Selain itu, ada juga kasus di mana pendamping sosial kesulitan menjangkau KPM yang tinggal di daerah terpencil atau sulit diakses.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Medan telah mulai mengimplementasikan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah dengan memperkuat kapasitas pendamping sosial melalui pelatihan intensif dan penyediaan alat bantu edukasi yang lebih komprehensif. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kualitas materi FDS dan memperluas jangkauan program ini.

Pendampingan tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan individu tetapi juga pada pemberdayaan komunitas. Misalnya, melalui kegiatan kolaboratif, seperti pelatihan keterampilan kerja atau program usaha kecil yang melibatkan kelompok KPM, pemerintah berharap dapat menciptakan solidaritas dan semangat gotong royong di antara penerima manfaat. Dengan cara ini, KPM tidak hanya memperoleh manfaat dari bantuan sosial tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan pendampingan dan peningkatan kapasitas KPM, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan tujuan jangka panjang PKH.

Dengan pengelolaan yang lebih baik, PKH dapat menjadi katalisator perubahan yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan.

Validasi dan Pemutakhiran Data

Proses validasi dan pemutakhiran data merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kota Medan, mekanisme ini menjadi tumpuan utama untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi terkini penerima manfaat. Validasi data berfungsi sebagai proses awal untuk mencocokkan informasi calon penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Sementara itu, pemutakhiran data bertujuan untuk memperbarui informasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan perubahan sosial ekonomi mereka.

Dalam praktiknya, validasi data dilakukan oleh pendamping sosial dengan cara mencocokkan data awal calon penerima manfaat yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi faktual di lapangan. Pendamping sosial biasanya menggunakan formulir validasi yang mencakup 83 pertanyaan mendalam terkait status ekonomi, jumlah anggota keluarga, akses terhadap pendidikan, dan kondisi kesehatan. Formulir ini dirancang untuk mendeteksi tingkat kemiskinan yang memenuhi syarat sebagai penerima PKH. Namun, proses ini sering kali terkendala oleh waktu yang terbatas. Dengan ribuan calon penerima manfaat yang harus diverifikasi, durasi validasi sering kali tidak memadai untuk menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh.

Pemutakhiran data adalah langkah lanjutan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa data KPM selalu mutakhir dan relevan. Proses ini melibatkan pencatatan perubahan penting, seperti kelahiran, kematian, perpindahan tempat tinggal, atau perubahan status ekonomi keluarga. Di Kota Medan, pemutakhiran data dilakukan melalui aplikasi e-PKH, di mana pendamping sosial harus mengunggah data baru ke sistem yang dikelola secara terpusat oleh Kementerian Sosial. Meski demikian, sejumlah hambatan teknis sering kali memperlambat proses ini. Salah satu masalah yang paling sering dilaporkan adalah gangguan pada jaringan aplikasi e-PKH, yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses atau mengunggah data secara real-time.

Selain kendala teknis, tantangan lain dalam pemutakhiran data adalah ketidakjujuran beberapa KPM. Dalam beberapa kasus, terdapat penerima manfaat yang sengaja menyembunyikan peningkatan status ekonomi mereka demi tetap menerima bantuan sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pendamping sosial dalam melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan keakuratan data. Namun, dengan jumlah pendamping yang terbatas, pengawasan terhadap ribuan KPM menjadi tugas yang sangat menantang.

Dinas Sosial Kota Medan telah berupaya meningkatkan validitas dan akurasi data melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pemutakhiran data, termasuk kepala lingkungan (kepling), perangkat kelurahan, dan kecamatan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata di masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengadakan program sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan informasi yang akurat selama proses validasi dan pemutakhiran data.

Langkah inovatif lainnya yang telah diimplementasikan adalah penggunaan metode By Name By Address (BNBA). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk memverifikasi data secara spesifik berdasarkan nama dan alamat calon penerima manfaat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan atau duplikasi data. BNBA digunakan secara luas selama tahap pramusyawarah kelurahan (pra-muskel), di mana data yang dikumpulkan dari lapangan dianalisis secara rinci. Tahapan ini melibatkan diskusi intensif antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pendamping sosial, kepling, dan perangkat kelurahan, untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemutakhiran data juga mencakup mekanisme graduasi, di mana keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima manfaat dikeluarkan dari program. Graduasi ini dapat bersifat alami, yaitu ketika KPM tidak lagi memiliki komponen yang memenuhi syarat (seperti anak usia sekolah atau anggota keluarga yang memerlukan bantuan khusus), atau bersifat mandiri, yaitu ketika kondisi sosial ekonomi keluarga membaik. Di Kota Medan, tahapan ini

direncanakan berlangsung dalam periode dua minggu, di mana data yang telah diperbarui dianalisis dan disandingkan dengan hasil survei lapangan.

Proses validasi dan pemutakhiran data di Kota Medan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial. Ke depan, perbaikan infrastruktur teknologi, pelatihan pendamping sosial, dan peningkatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program ini. Dengan data yang valid dan mutakhir, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tujuan jangka panjang PKH dalam mengurangi kemiskinan dapat tercapai.

Mekanisme Graduasi: Meningkatkan Keberlanjutan Program

Graduasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah proses penting untuk memastikan bahwa penerima bantuan sosial yang telah berhasil meningkatkan kondisi sosial ekonominya dapat keluar dari program secara terstruktur dan berkelanjutan. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program dengan mengalihkan sumber daya kepada keluarga yang lebih membutuhkan, sekaligus mendorong keluarga yang telah keluar dari program untuk mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Di Kota Medan, mekanisme graduasi dilakukan melalui evaluasi status sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proses ini terbagi menjadi dua jenis: graduasi alami dan graduasi mandiri (sejahtera mandiri). Graduasi alami terjadi ketika KPM tidak lagi memenuhi kriteria komponen penerima manfaat, seperti anak yang telah menyelesaikan pendidikan wajib atau perubahan dalam status kesehatan anggota keluarga. Sementara itu, graduasi mandiri terjadi ketika kondisi sosial ekonomi keluarga telah membaik, memungkinkan mereka untuk keluar dari program tanpa menurunkan kualitas hidup.

Dalam periode dua tahap awal tahun 2024, sebanyak 50.222 KPM (Januari-Februari) dan 47.932 KPM (Maret-April) menerima bantuan dengan total nilai Rp69.395.039.814,-. Namun, data menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat tidak selalu mencerminkan penurunan kemiskinan, karena mekanisme graduasi belum sepenuhnya optimal. Salah satu tantangan utama dalam implementasi graduasi di Kota Medan adalah ketidakjujuran sebagian KPM yang sengaja menyembunyikan kondisi sosial ekonomi mereka agar tetap memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

Selain itu, resistensi terhadap graduasi sering kali muncul, baik dari pihak penerima manfaat maupun masyarakat di sekitar mereka. Sebagian KPM merasa bahwa keluarnya mereka dari program akan mengurangi tingkat keamanan finansial mereka. Di sisi lain, tekanan dari komunitas, seperti perangkat kelurahan atau tokoh masyarakat, sering kali memengaruhi proses graduasi. Dalam beberapa kasus, perangkat kelurahan bahkan membela KPM yang sudah tidak memenuhi syarat untuk tetap mendapatkan bantuan.

Pemerintah Kota Medan telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses graduasi, termasuk pendamping sosial, kepala lingkungan (kepling), perangkat kelurahan, dan kecamatan. Pendamping sosial memiliki peran penting dalam mendampingi KPM selama masa transisi keluar dari program. Mereka memberikan edukasi dan motivasi agar KPM dapat memanfaatkan peluang lain untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti program pelatihan keterampilan atau akses ke program pemberdayaan ekonomi.

Graduasi juga melibatkan mekanisme resertifikasi, yaitu proses evaluasi berkala terhadap status sosial ekonomi KPM. Resertifikasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan By Name By Address (BNBA) untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan mencerminkan kondisi terbaru. Tahapan ini mencakup verifikasi langsung di lapangan oleh pendamping sosial untuk mengidentifikasi KPM yang layak melanjutkan program atau yang sudah harus keluar.

Langkah lain yang diambil adalah pemberian akses kepada program lanjutan bagi KPM yang telah graduasi. Pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan lembaga swasta dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan pelatihan keterampilan kerja, program kredit usaha mikro, atau dukungan lain yang dapat membantu KPM meningkatkan kemandirian.

ekonomi mereka. Melalui kolaborasi ini, diharapkan keluarga yang telah keluar dari PKH dapat terus meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa kembali ke kondisi prasejahtera.

Salah satu inovasi yang mulai diterapkan di Kota Medan adalah pelibatan teknologi dalam proses graduasi. Aplikasi e-PKH digunakan untuk memonitor status sosial ekonomi KPM secara real-time, sehingga mempermudah pendamping sosial dalam mengidentifikasi keluarga yang siap untuk graduasi. Namun, kendala teknis seperti jaringan aplikasi yang tidak stabil sering kali memperlambat proses ini. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berencana memperkuat infrastruktur teknologi agar data yang dihasilkan lebih cepat dan akurat.

Graduasi dalam PKH bukan sekadar proses administrasi, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan memastikan bahwa keluarga yang keluar dari program telah memiliki kapasitas ekonomi yang memadai, mekanisme ini dapat membantu memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Meski tantangan masih ada, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjadikan PKH sebagai program yang tidak hanya memberikan bantuan sosial tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan keberhasilan mekanisme graduasi, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi. Ini mencakup peningkatan kapasitas pendamping sosial, penguatan infrastruktur teknologi, dan perluasan kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, PKH tidak hanya menjadi solusi sementara bagi kemiskinan tetapi juga alat strategis untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Tantangan dan Saran untuk Optimalisasi

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan telah menunjukkan banyak capaian positif, namun tetap tidak luput dari berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius untuk meningkatkan efektivitasnya. Adapun tantangannya sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian data

Data penerima manfaat yang digunakan oleh pemerintah sering kali tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Proses validasi yang bergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkadang tidak akurat, sehingga menyebabkan beberapa keluarga miskin yang layak menerima bantuan justru terlewatkan. Di sisi lain, terdapat pula penerima yang sebenarnya tidak lagi memenuhi syarat, tetapi tetap berada dalam daftar karena kurangnya sistem verifikasi yang memadai.

2. Masalah teknis

Masalah teknis juga menjadi penghambat signifikan. Gangguan pada aplikasi e-PKH yang digunakan untuk pemutakhiran data sering kali memperlambat proses validasi dan distribusi bantuan. Hambatan teknis ini diperparah oleh jaringan internet yang tidak stabil, terutama di wilayah-wilayah tertentu yang sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pembaruan data dan distribusi bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

3. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia khususnya pendamping sosial yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program. Dengan jumlah KPM yang terus bertambah, pendamping sosial sering kali menghadapi beban kerja yang terlalu berat. Hal ini berdampak pada keterbatasan waktu dan perhatian yang dapat mereka berikan kepada setiap KPM, terutama dalam kegiatan edukasi dan pemberdayaan.

4. Mekanisme graduasi

Sebagian KPM, meskipun sudah tidak memenuhi syarat atau telah mandiri secara ekonomi, cenderung ingin tetap menerima bantuan karena kekhawatiran kehilangan sumber pendapatan tambahan. Tekanan dari komunitas atau lingkungan sekitar, seperti perangkat kelurahan yang membela KPM tertentu, sering kali memperumit proses ini. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan jangka panjang PKH sebagai program pemberdayaan, bukan semata-mata bantuan finansial, juga menjadi kendala dalam implementasi graduasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, sejumlah rekomendasi strategis dapat diusulkan, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan akurasi dan transparansi data
Pemerintah harus memperkuat sistem pemutakhiran data dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, seperti integrasi dengan basis data kependudukan nasional. Metode By Name By Address (BNBA) yang sudah digunakan dapat lebih dioptimalkan melalui pelibatan berbagai pihak, termasuk pendamping sosial, kepala lingkungan, dan perangkat kelurahan, untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar valid dan mencerminkan kondisi lapangan.
2. Penguatan kapasitas pendamping sosial.
Pelatihan intensif harus diberikan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan pendamping sosial, baik dalam hal teknis, seperti pengoperasian aplikasi e-PKH, maupun aspek non-teknis, seperti komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga perlu menambah jumlah pendamping sosial agar rasio antara pendamping dan KPM menjadi lebih ideal, sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan perhatian yang lebih personal kepada setiap keluarga.
3. Sosialisasi yang lebih intensif dan inklusif.
KPM dan masyarakat sekitar perlu memahami bahwa graduasi adalah bagian dari perjalanan program untuk menciptakan kemandirian, bukan penghentian mendadak bantuan tanpa solusi. Program ini harus disertai dengan pemberian akses kepada program lanjutan, seperti pelatihan keterampilan kerja, kredit usaha mikro, atau dukungan pemberdayaan lainnya. Kolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi nonpemerintah dapat menjadi solusi untuk memastikan KPM graduasi tetap mendapatkan dukungan untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraan mereka.
4. Penguatan infrastruktur teknologi
untuk memastikan kelancaran operasional aplikasi e-PKH, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi untuk meningkatkan keandalan jaringan dan aksesibilitas aplikasi. Langkah ini penting untuk mengurangi hambatan teknis yang selama ini menghambat validasi data dan distribusi bantuan.
5. Pelibatan komunitas secara aktif
Dengan membangun forum komunikasi antara pemerintah, pendamping sosial, dan masyarakat, proses pengambilan keputusan terkait PKH dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan ini juga dapat membantu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, sehingga mereka lebih mendukung mekanisme seperti graduasi dan pemutakhiran data.

KESIMPULAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Pelaksanaan PKH di Kota Medan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, mencakup tahapan perencanaan, validasi data, penyaluran bantuan, pendampingan, pemutakhiran data, hingga graduasi. Meskipun program ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, berbagai tantangan masih ditemukan dalam implementasinya.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi ketidaksesuaian data penerima manfaat, gangguan teknis dalam penggunaan aplikasi e-PKH, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta resistensi terhadap mekanisme graduasi. Masalah validasi data sering menyebabkan keluarga miskin yang layak tidak terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara beberapa penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria tetap berada dalam program. Hambatan teknis dan minimnya jumlah pendamping sosial memperburuk pelaksanaan di lapangan, sehingga berpengaruh pada efektivitas program secara keseluruhan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya optimalisasi yang terarah dan berkelanjutan. Rekomendasi strategis mencakup penguatan sistem pemutakhiran data berbasis teknologi untuk memastikan akurasi data, peningkatan kapasitas pendamping sosial melalui pelatihan dan penambahan jumlah personel, sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya

graduasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat, dalam mendukung pemberdayaan KPM.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan PKH di Kota Medan, program ini tetap menjadi instrumen perlindungan sosial yang efektif dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan perbaikan tata kelola dan penguatan sistem, PKH berpotensi menjadi katalisator yang mampu memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, A. Y., Irwantoro, I., Rozikin, M., & Sayyidati, A. (2021). Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan di Indonesia: Quick Evaluation Analysis. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 15(1), 24-42
- Edu, E., & Rohman, A. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 67-74.
- Gustina, Y. (2020). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Moleong, Lexy. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi revisi. Bandung: PT Remaja
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019.
- Saraswati, A. (2018). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandan surat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan. Lampung